

Strategi Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil Sektor Wisata Bahari di Pulau Kecil (Studi Kasus Pulau Bunaken, Kota Manado, Sulawesi Utara)

Strategy Analysis for Development of Micro and Small-Scale Industry Sector Marine Tourism in Small Island (Case Study Bunaken Island, Sulawesi Utara)

Tria Friliyantini^{*1}, Aida Vitayala S. Hubeis² dan Aris Munandar³

¹ Alumni PS MPI, SPs IPB; Kementerian Kelautan dan Perikanan

² Departemen Komunikasi Pembangunan Pertanian, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor

³ Departemen Arsitektur Lanskap, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor

ABSTRACT

As a part of ecotourism, marine tourism activities depend on the attractiveness of the marine itself. This marine tourism becomes one of promising marine industry for year to year comes. The attractiveness of the marine tourism is diversely including marine traveling, marine observing and many activities right on the coast and ocean per day, such as fishing, diving, surfing, canoeing as well as traditional ceremony which takes place right on the ocean or beaches. Businesses categorized as small, middle to micro business become supporting business in developing marine ecotourism particularly in small island. Some of these developing businesses which support the marine tourism activity are small bars and restaurants, souvenir shops, renting equipments for snorkling, diving, surfing, jet skying, game fishing and boating, renting small transportation such as bicycles, motorcycles, cars, and some other services including translators, snack selling including coconut selling and other economic generating activities. The aims to the study are (1) to identify any small business which support marine tourism in small island, (2) to analyze small business management related to marine tourism which able to awaken local community to achieve better local incomes, and (3) to perform strategic development of the small business supporting marine tourism in small island which can be applied individually or group of people. Purposive sampling method was applied to obtain respondents of small island population, by means the respondents are determined based on the qualification made for the study. Scenario analysis was performed in order to obtain the link story, scenarios were performed, they were pessimistic, semi pessimistic, semi optimistic, and optimistic. The developing strategy for small business management which supporting marine tourism of small island then was analyzed by using internal and external factors which included social, economics, social facilities, environments and policies, presumably all of these factors would affect the development of the marine tourism industry from now until the years come. *Analytical Hierarchy Process* (AHP) was used in order to obtain the accurate decision made for determining strategic alternative of developing small business related to marine tourism in small island. The obtaining strategic alternatives were (a) the use of a small island as an object for small business in marine tourism, (b) awakening of local community related to many sectors of marine tourism, (c) mechanism improvement of the marine tourism management in small island, (d) development of marine tourism facilities in the small island, (e) improvement of human/local capacity and capability which supporting the business, and (f) improvement of policies maikin and agencies. All of these strategic alternatives were applied in strategic analysis for developing of small business in marine tourism sector which suitable to be applied in others small islands. It was also expected that these analysis strategies were able to accomodate many other stakeholders with their wills to evoke local community capacity in which in return this would be able to stimulate sustainable and natural resources based economic growth locally and nationally.

Key words: marine tourism, micro and small-scale industry, small island

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki sekitar 17.504 pulau, dengan panjang garis pantai kurang lebih 91.524 km dan luas perairan laut mencapai 5,8

juta km². Kondisi ini didukung oleh keanekaragaman hayati terumbu karang yang mencapai sekitar 600 species dan 40 genus, dengan luasan terumbu karang 7.500 km² yang tersebar dan dimiliki oleh pulau-pulau kecil. Kondisi yang kaya tersebut dapat diandalkan untuk kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam pembangunan bidang wisata bahari (DKP, 2006). Pembangunan wisata bahari di pulau-pulau kecil sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 27

^{*}) Korespondensi :
Jl. Cikuray No. 25, Bogor
e-mail: friliyantini@yahoo.com

Tahun 2007 beserta turunannya, yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. PER.20/MEN/2008 tentang pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya.

Laut Indonesia merupakan bagian terbesar di kawasan Asia Tenggara yang memiliki potensi wisata bahari yang beraneka ragam dengan berbagai keunikan lebih tinggi dan kelangkaan lebih banyak. ASEAN yang merupakan bagian dari Asia Tenggara memiliki potensi pariwisata bahari yang lebih baik dibandingkan dengan kawasan *Mediterranean* dan *Caribbean*. Dalam konteks tersebut, Indonesia berpeluang menjadi salah satu tujuan wisata bahari terbesar di dunia, dengan basis *Marine Ecotourism*, khususnya dalam pengembangan wisata bahari di pulau-pulau kecil (PPK) termasuk kawasan pulau-pulau kecil terluar (PPKT). Pengalaman yang diperoleh dari negara-negara yang telah mengembangkan kegiatan wisata bahari di PPK terbukti dapat membangkitkan pengaruh berganda (*multiplier effect*) yang sangat besar pada kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. Skala nasional menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berasal dari wisata bahari memberikan dampak positif bagi neraca keuangan negara, baik dari sisi pendapatan domestik maupun nasional atau *Gross National Product* (GNP). Prediksi pariwisata Indonesia terhadap GNP tahun 2007 menurut *World Tourism Center* adalah 10,1%. Jumlah tersebut setara dengan US\$ 67 miliar, dengan jumlah penyerapan tenaga kerja sekitar 8,5 juta orang (DKP, 2006).

Upaya pengelolaan dan pemanfaatan potensi wisata bahari di pulau kecil secara optimal dapat dilakukan melalui pembinaan usaha kecil, menengah dan mikro (UMKM). Pembinaan dimaksud meliputi peningkatan kemampuan atau keahlian dengan mengadakan (mendatangkan) pelatihan secara berkala, dengan harapan dapat meningkatkan keahlian masyarakat setempat, sehingga akhirnya dapat menciptakan lapangan pekerjaan dalam mendukung pengembangan usaha wisata bahari di pulau-pulau kecil.

Pemahaman mendalam tentang dinamika perkembangan pariwisata mutlak diperlukan untuk mempersiapkan sektor pariwisata sebagai "*The Biggest Foreign Exchange Earner*". Pariwisata adalah salah satu industri baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang dalam penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan serta menstimulasi sektor-sektor lainnya (Hidayat, 2002).

Beberapa jenis UMKM yang dapat dikembangkan dalam mendukung wisata bahari adalah:

1. Usaha wisata bahari berbasis laut seperti jasa penyewaan peralatan *snorkling*, *diving*, *surfing*, *jet ski*, *game fishing* dan *boat*.
2. Usaha wisata bahari berbasis pesisir atau daratan, seperti penginapan, kedai minuman dan restoran kecil, toko atau warung cindramata.

3. Usaha wisata bahari pendukung seperti jasa penyewaan sepeda, motor dan mobil, penyedia *translater*, warung internet, warung telepon, pedagang asongan, pedagang buah kelapa dan kegiatan ekonomi lainnya.

Jenis UMKM tersebut di atas, khususnya di sektor wisata bahari tidak serta merta dapat diterapkan begitu saja di pulau-pulau kecil. Hal ini antara lain dikarenakan pulau-pulau kecil memiliki karakteristik khusus dari segi sosial, ekonomi, budaya, ekologi, serta daya dukung yang terbatas.

Pengembangan UMKM dalam pengembangan usaha wisata bahari harus dianalisis dampaknya pada *triple bottom line benefit cost* (Munandar, 2007). Secara ekonomi dampak tersebut meliputi pertumbuhan perekonomian, pertumbuhan usaha, *income* atau kesejahteraan masyarakat sebagai dampak dari usaha berbasis wisata. Dari sisi kualitas lingkungan adalah integritas lanskap, kerusakan obyek atau ekosistem khas, serta berkurangnya spesies langka. Secara sosial budaya adalah keterlibatan masyarakat dalam kegiatan wisata bahari.

Dalam penelitian ini Pulau Bunaken di Kota Manado, Sulawesi Utara, diambil sebagai studi kasus, mengingat di Pulau Bunaken telah terdapat institusi dan aktivitas wisata bahari yang cukup berkembang. Disamping itu pada tahun 2009 Kota Manado akan menjadi tuan rumah *World Ocean Conference* dan Kota Manado sebagai kota pariwisata dunia 2010. Dengan demikian diharapkan strategi yang dihasilkan dapat diaplikasikan pada pengembangan di pulau-pulau kecil yang memiliki karakteristik yang mirip dengan Pulau Bunaken.

Tujuan dari kajian ini adalah (1) mengidentifikasi usaha mikro dan kecil sektor wisata bahari di pulau kecil, (2) menganalisis mekanisme pengelolaan usaha mikro dan kecil sektor wisata bahari di pulau kecil dalam rangka pemberdayaan masyarakat guna mencapai pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal yang lebih baik, (3) menyusun strategi pengembangan usaha mikro dan kecil sektor wisata bahari di pulau kecil yang tepat.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus di Pulau Bunaken, Kota Manado, Sulawesi Utara melalui pengamatan langsung di lokasi penelitian. Untuk menganalisis skenario pengembangan wisata bahari digunakan analisis skenario, sedangkan untuk strategi pengembangan wisata bahari melalui evaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi digunakan *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Saaty (1993), mengemukakan bahwa AHP merupakan analisis pengambilan keputusan yang dilakukan dengan menggunakan

pendekatan sistem, sehingga dapat membantu di dalam melakukan prediksi untuk mengambil keputusan.

Beberapa keuntungan yang diperoleh bila memecahkan persoalan dan mengambil keputusan dengan menggunakan AHP (Marimin, 2004) adalah:

1. Kesatuan. AHP memberikan satu model tunggal yang mudah dimengerti dan luwes untuk aneka ragam persoalan tidak terstruktur.
2. Kompleksitas. AHP memadukan rancangan deduktif dan rancangan berdasarkan sistem dalam memecahkan persoalan kompleks.
3. Saling ketergantungan. AHP dapat menanganikan saling ketergantungan unsur-unsur dalam suatu sistem dan tidak memaksakan pemikiran linear.
4. Penyusunan Hirarki. AHP mencerminkan kecenderungan alami pikiran untuk memilah-milah unsur-unsur suatu sistem dalam berbagai tingkat berlainan dan mengelompokkan unsur yang serupa dalam setiap tingkat.
5. Pengukuran. AHP memberi suatu skala untuk mengukur hal-hal yang diwujudkan dalam suatu metode untuk menetapkan prioritas.
6. Konsistensi. AHP melacak konsistensi logis dari pertimbangan-pertimbangan yang digunakan untuk menetapkan berbagai prioritas.
7. Sintesis. AHP menuntun ke suatu taksiran menyeluruh tentang kebaikan setiap alternatif.
8. Tawar-menawar. AHP mempertimbangkan prioritas-prioritas relatif dari berbagai faktor sistem dan memungkinkan organisasi memilih alternatif terbaik berdasarkan tujuan-tujuannya.
9. Penilaian dan konsensus. AHP tidak memaksakan konsensus, tetapi mensintesiskan suatu hasil yang representatif dari penilaian berbeda.
10. Pengulangan Proses. AHP memungkinkan organisasi memperhalus definisinya pada suatu persoalan dan memperbaiki pertimbangan dan pengertian melalui pengulangan.

Teknik penentuan responden dalam rangka menggali data yang dibutuhkan ditentukan dengan teknik dipilih secara sengaja (*purposive sampling*), artinya responden yang dipilih sesuai dengan kebutuhan data penelitian. Total jumlah responden terpilih yang merupakan representasi dari *stakeholders* di Kota Manado untuk pengembangan usaha kecil sektor wisata bahari di pulau kecil berjumlah 5 (lima) responden terpilih (Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Manado, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Manado, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi, Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Manado, dan DPTNB) untuk penilaian *expert* dan 25 responden untuk pendukung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Taman Nasional Laut Bunaken (TNB) terletak di Provinsi Sulawesi Utara. Kawasan ini seluas 75.265 hektar dan terdiri dari lima (5) pulau, yakni Pulau Manado Tua, Pulau Bunaken, Pulau Siladen, Pulau Mantehage dan Pulau Naen dengan jumlah total populasi kurang lebih sekitar 21.000 jiwa. Secara geografis TNB masuk dalam perairan "Segi Tiga Emas" yaitu perairan yang menghubungkan laut Papua, Philipina dan Indonesia yang memiliki habitat lebih dari 3.000 spesies ikan.

Pulau Bunaken adalah sebuah pulau seluas 8,08 km² yang berada di perairan Laut Sulawesi pada 1° 35' - 1° 49' LU dan 124° 39' - 124° 35' BT. Pulau ini merupakan bagian dari kota Manado, ibu kota provinsi Sulawesi Utara, yang memiliki iklim tropis dengan curah hujan berkisar 2.000-3.000 mm per tahun, suhu udara antara 26°-31° C. Pulau Bunaken memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi.

Menurut Departemen Kelautan dan Perikanan (2007) keanekaragaman hayati tersebut meliputi hal-hal berikut:

1. Ekosistem laut dan pesisir yang terdiri dari: (a) terumbu karang jenis terumbu karang tepi dan terumbu karang penghalang, (b) padang lamun tropis (*seagrass*), (c) rumput laut (*seaweed*), (d) hutan bakau atau mangrove, (e) sekitar 91 jenis ikan, di antaranya ikan dan (f) jenis *mollusca*.
2. Ekosistem daratan (*terrestrial*) terdiri dari kawasan hutan tropis yang kaya akan jenis palem, sagu, woka, silar dan kelapa, serta kelompok satwa unik sebelah timur garis *wallace*, seperti berbagai jenis burung laut seperti camar, bangau, dara laut dan cangkak laut.
3. Pulau Bunaken memiliki jasa-jasa lingkungan berupa 12 titik penyelaman yang berjajar dari bagian tenggara hingga bagian barat laut. Di wilayah ini terdapat *underwater great walls* atau yang disebut juga *hanging walls* atau dinding-dinding karang raksasa yang berdiri vertikal dan melengkung ke atas.

Semua pengunjung (penyelam maupun bukan penyelam) yang mengunjungi Taman Nasional Laut Bunaken (TNB) diwajibkan membayar tarif masuk, sesuai Perda Pemda Sulawesi Utara No. 9/2002. Tarif masuk untuk orang asing adalah Rp 50.000 untuk tiket harian (sekitar US\$ 6), atau Rp 150.000 (sekitar US\$ 17) dengan mendapatkan *tag* (lencana) masuk yang terbuat dari plastik tahan air yang berlaku untuk satu tahun kalender.

Sarana dan prasarana yang ada di Pulau Bunaken relatif masih minim dalam mendukung perkembangan wisata bahari. Hal ini terlihat dengan sulitnya penyediaan air bersih yang masih bergantung pada Kota Manado, sementara air bersih untuk kebutuhan minum dan mandi sangat

dibutuhkan untuk usaha yang dilakukan seperti *homestay*, hotel, rumah makan, pedagang makanan dan lainnya.

Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana dalam mendukung usaha kecil sektor wisata bahari di Pulau Bunaken menimbulkan dampak pertumbuhan ekonomi masyarakat seiring dengan efisiensi biaya yang dikeluarkan. Beberapa sarana dan prasarana pendukung pengembangan perekonomian di Pulau Bunaken dalam usaha wisata bahari terbagi menjadi 2, yaitu (a) sarana dan prasarana pokok pengelolaan dan (b) sarana dan prasarana pokok wisata alam.

Identifikasi Usaha Mikro dan Kecil Sektor Wisata Bahari di Pulau Bunaken

Dari hasil pengamatan dan wawancara dengan responden, maka jenis usaha mikro dan kecil pendukung wisata bahari di pulau Bunaken dapat dikategorikan: (a) primer (penyewa alat selam, *homestay*, sewa perahu katamaran), (b) sekunder (penjual cinderamata/makanan, penjual kelapa muda dan pemandu wisata), (c) tersier (*cottage*/hotel, restoran dan pemilik perahu).

Jumlah responden yang mendukung penelitian dalam identifikasi usaha kecil sektor wisata bahari di pulau Bunaken ada 25 (dua puluh) lima orang dengan rincian pada Tabel 1. Telah ditentukan bahwa yang disebut dengan usaha wisata bahari primer adalah UMKM yang telah ada berkembang sebelum usaha lainnya, usaha wisata bahari sekunder merupakan UMKM pelengkap dari usaha primer, sedangkan usaha

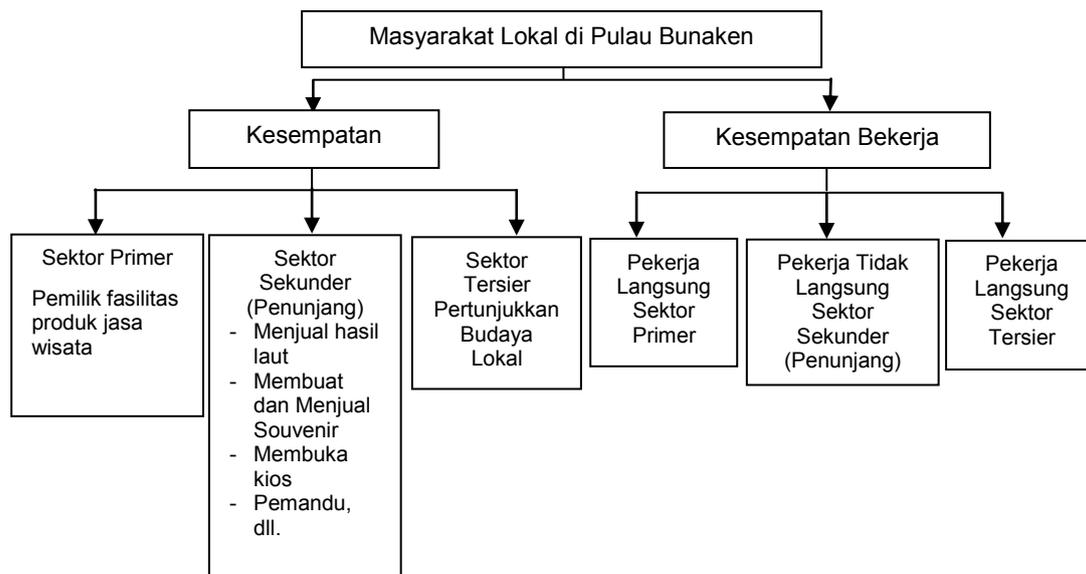
wisata bahari tersier merupakan UMKM pendukung dari primer dan sekunder.

Tabel 1. Rekapitulasi responden berdasarkan kategori usahanya

No.	JENIS USAHA MIKRO DAN KECIL	Jumlah (Orang)
1	Penjual cinderamata dan makanan	9
2	Nelayan	5
3	Sewa perahu katamaran	3
4	Pemandu wisata	2
5	<i>Homestay</i>	1
6	Penyewa alat selam	5
TOTAL RESPONDEN		25

Berdasarkan identifikasi dan pengamatan di lapangan, pengembangan wisata bahari dalam mendukung usaha mikro, kecil dan menengah di Pulau Bunaken sangat bergantung pada pelibatan masyarakat setempat. Partisipasi masyarakat akan muncul apabila masyarakat memahami bahwa wisata bahari mampu meningkatkan pendapatan, karena dapat menciptakan lapangan berusaha dan kesempatan untuk bekerja seperti terlihat pada Gambar 1.

Peluang pelibatan masyarakat dalam memanfaatkan wisata bahari sebenarnya cukup terbuka lebar. Agar tidak terjadi kesenjangan sosial antara masyarakat lokal dengan pengusaha, maka pemerintah diharapkan dapat memberikan peluang yang sama dan adil bagi semua pihak untuk berpartisipasi dalam mendapatkan perolehan manfaat.



Gambar 1. Skema pelibatan masyarakat lokal dalam pengembangan wisata bahari di Pulau Bunaken

Skenario Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil Sektor Wisata Bahari di Pulau Bunaken

Model pengambilan keputusan dalam pengelolaan wisata bahari melalui usaha mikro, kecil dan menengah memberikan bentuk-bentuk skenario yang mungkin terjadi didasarkan pada

proses keterkaitan antara tiga unsur, yaitu sumber daya kelautan, masyarakat dan kebijakan. Keadaan pengelolaan wisata bahari di Pulau Bunaken saat ini mempunyai pengelolaan cukup baik. Namun, masih terdapat faktor-faktor yang perlu diperhatikan, yaitu faktor politik, ekonomi, sosial dan politik.

Faktor politik sangat berpengaruh dalam hal kunjungan wisatawan, karena apabila stabilitas keamanan suatu daerah wisata tidak aman dan nyaman, maka kunjungan wisatawan akan menurun dan begitu pula sebaliknya. Agar aman dan nyaman, diperlukan kebijakan/peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah.

Faktor ekonomi dipengaruhi oleh kurs rupiah dan suku bunga yang tidak menentu. Apabila kurs rupiah dan suku bunga naik, maka harga produk wisata bahari meningkat, baik dari segi akomodasi maupun transportasi, sehingga akan mengakibatkan adanya penurunan wisatawan.

Faktor sosial sangat berpengaruh dalam pengembangan wisata bahari di Pulau Bunaken, karena langsung melibatkan masyarakat setempat dalam mempromosikan daerah wisatanya. Masyarakat dapat melestarikan kebudayaan lokal menjaga kelestarian lingkungan, yaitu SDA yang merupakan modal utama dalam produk wisata bahari di Pulau Bunaken.

Faktor sarana dan prasarana, baik pokok maupun pendukung sangat mendorong pengembangan usaha wisata bahari. Salah satu sarana di era globalisasi adalah *internet* yang dapat dijadikan media untuk mempromosikan produk wisata bahari di Pulau Bunaken serta

memberikan informasi kepada para wisatawan yang akan berkunjung.

Dari faktor-faktor politik, ekonomi, sosial dan sarana dan prasarana yang berpengaruh tersebut, terdapat persoalan antara harapan dan kenyataan yang sebenarnya. Hal ini yang dapat menjembatani tersebut dapat di ukur, distrukturkan dan dianalisis dengan bantuan berbagai alat, antara lain melakukan kombinasi antara *Multicriteria Analysis* dan AHP. Berdasarkan *output* dan harapan masyarakat terhadap skenario pengembangan wisata bahari melalui usaha mikro di pulau bunaken, faktor dan kriteria yang mempengaruhi serta skenario yang mungkin terjadi dapat dibuat model analisis skenario.

Dari pengukuran yang dilakukan melalui alat *Multicriteria Analysis* dan AHP, diperoleh urutan tingkat kepentingan setiap faktor dalam penentuan keluaran skenario yang terjadi sebagai berikut: (a) Faktor Sarana dan Prasarana (akses transportasi, promosi, sistem informasi, efisiensi biaya), (b) Faktor Sosial (penyerapan tenaga kerja, demografi, tradisi masyarakat lokal, kesadaran lingkungan), (c) Faktor Ekonomi (kurs rupiah, pemasaran, suku Bunga, fluktuasi harga), (d) Faktor Politik (subsidi, kebijakan atau peraturan, stabilitas Keamanan, pajak).

Tabel 2. Pembobotan *Multicriteria Analysis* pengelolaan usaha kecil sektor Wisata Bahari di Pulau Bunaken pada tahun 2008

Kriteria	Skenario A	Skenario B	Skenario C	Skenario D
	Pesimistis	Semi Pesimistis	Semi Optimistis	Optimistis
Politik				
- Pajak	0,28	0,27	0,22	0,23
- Subsidi	0,22	0,23	0,28	0,33
- Stabilitas Keamanan	0,24	0,28	0,24	0,24
- Kebijakan/Peraturan	0,23	0,21	0,25	0,31
Rataan 1	0,24	0,25	0,25	0,28
Ekonomi				
- Kurs rupiah	0,24	0,15	0,23	0,38
- Suku Bunga	0,28	0,25	0,23	0,24
- Pemasaran	0,19	0,18	0,26	0,37
- Fluktuasi Harga	0,25	0,25	0,28	0,22
Rataan 2	0,24	0,21	0,25	0,30
Sosial				
- Demografi	0,14	0,14	0,24	0,49
- Kesadaran Lingkungan	0,47	0,28	0,17	0,08
- Penyerapan Tenaga Kerja	0,10	0,10	0,25	0,56
- Tradisi masyarakat lokal	0,20	0,15	0,23	0,43
Rataan 3	0,23	0,17	0,22	0,39
Sarana dan Prasarana				
- Efisiensi Biaya	0,14	0,16	0,27	0,43
- Akses Transportasi	0,10	0,10	0,20	0,61
- Sistem Informasi	0,12	0,13	0,23	0,52
- Promosi	0,10	0,14	0,18	0,58
Rataan 4	0,12	0,13	0,22	0,53

Dari Tabel 2 dapat disimulasikan peranan setiap kriteria yang paling prioritas dalam pengelolaan usaha mikro dan kecil sektor wisata bahari di pulau Bunaken, yaitu: sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan politik terhadap kenyataan-kenyataan berupa faktor atas kondisi

pengelolaan yang terjadi saat ini. Terdapat empat hal yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam mensimulasikan unsur-unsur kebijaksanaan pengelolaan usaha mikro dan kecil sektor wisata bahari di

pulau Bunaken untuk proses pengambilan keputusan yaitu:

1. Peningkatan sarana dan prasarana khususnya akses transportasi.
2. Penyerapan tenaga kerja untuk peningkatan pendapatan.
3. Naik turunnya kurs rupiah yang mempengaruhi kunjungan wisatawan.
4. Unsir kebijakan atau peraturan, khususnya dalam pemberian subsidi kepada usaha mikro dan kecil.

Sehingga sintesis yang didapat dalam mekanisme pengelolaan usaha mikro dan kecil sektor wisata bahari menghasilkan skenario optimistis, yaitu usaha mikro dan kecil sektor wisata bahari di pulau kecil akan tumbuh dan berkembang secara optimal dan memberikan dampak peningkatan ekonomi masyarakat lokal seiring dengan pelestarian lingkungan pulau kecil dan sekitarnya.

Strategi Pengembangan Usaha Kecil Sektor Wisata Bahari di Pulau Bunaken

Untuk menyusun strategi pengembangan usaha mikro dan kecil sektor wisata bahari di pulau Bunaken, terdapat beberapa permasalahan yang perlu dipertimbangkan. Permasalahan tersebut dikelompokkan dalam lima unsur, yaitu Sasaran, Faktor, Aktor, Tujuan dan Alternatif Strategi.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, disusun suatu hirarki untuk memformulasikan strategi pengembangan usaha kecil sektor wisata bahari di Pulau Bunaken. Berdasarkan hirarki ini dilakukan penyusunan kuesioner yang diajukan kepada para responden. Setelah itu, kuesioner tersebut dianalisis dengan menggunakan AHP dengan syarat hanya pendapat responden yang memiliki rasio konsistensi $\leq 10\%$ yang akan dianalisis lebih lanjut. Dari lima responden yang mengisi kuesioner seluruh pendapat dari kelima responden dapat dianalisis, karena rasio konsistensi $\leq 10\%$. Hasil pengolahan dengan menggunakan *software Expert Choice* yang menggambarkan urutan prioritas utama, kedua dan seterusnya sesuai bobot.

1. Sasaran/Goal

Sasaran adalah apa yang ingin dicapai melalui strategi pengembangan usaha kecil sektor wisata bahari di Pulau Bunaken. Dalam hal ini, tujuan yang ingin dicapai adalah pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan sektor wisata bahari di Pulau Bunaken. Yang dimaksud pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses pendidikan dalam rangka merubah pola pikir masyarakat, khususnya masyarakat pulau kecil di Pulau Bunaken yang pada awalnya memiliki anggapan bahwa sumber daya laut yang dapat dimanfaatkan hanyalah ikan saja. Padahal

SDA laut memiliki nilai ekonomi yang tinggi, apabila dimanfaatkan dengan benar.

Kata pemberdayaan mengandung makna adanya suatu proses peningkatan kemampuan dan keahlian, khususnya dalam rangka mempromosikan wisata alamnya dengan dukungan usaha kecil di pulau kecil. Sesuai dengan Otonomi Daerah, masing-masing daerah memiliki kebebasan dan tanggung-jawab untuk mengembangkan dan memajukan daerahnya dan semuanya tidak hanya bergantung kepada Pemerintah Daerah, tetapi juga seluruh bagian dari masyarakat.

2. Faktor

Faktor adalah dasar pemikiran yang perlu diidentifikasi dan diprioritaskan untuk mencapai sasaran utama tersebut. Berdasarkan hasil diskusi dan wawancara dengan responden, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan wisata bahari dalam mendukung usaha mikro di Pulau Bunaken, yaitu:

- a. SDA tentunya sangat diperlukan dalam pengembangan usaha kecil sektor wisata bahari ini. Dengan adanya SDA yang tersedia maka rencana pengembangan usaha kecil kemungkinan besar akan berjalan, sehingga masyarakat pulau Bunaken dapat ikut serta dalam usaha tersebut.
- b. Sumber daya manusia (SDM) yaitu tenaga kerja yang menjadi tulang punggung bagi berlangsungnya usaha kecil sektor wisata bahari di pulau kecil. Usaha kecil sektor wisata bahari tidak akan berjalan tanpa partisipasi aktif dari setiap lini masyarakat di pulau Bunaken.
- c. Sumber daya buatan (SDB) yang dimaksud adalah bentuk-bentuk kelembagaan masyarakat yang berasal dari budaya lokal, misalnya kearifan lokal di pulau Bunaken dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke pulau Bunaken.
- d. *Good political will* dari Pemerintah Daerah dalam pengembangan usaha mikro sektor wisata bahari di pulau Bunaken melalui kebijakan atau peraturan daerah yang berpihak pada keberhasilan usaha kecil di sektor wisata bahari.
- e. Faktor politik, sosial dan budaya sangat berpengaruh dalam hal kunjungan wisatawan, diantaranya stabilitas keamanan suatu daerah wisata yang tidak aman dan tidak nyaman, serta ekonomi yang tidak stabil akan menimbulkan harga produk wisata yang tidak menentu, sehingga akan berpengaruh terhadap jumlah dan frekuensi kunjungan wisatawan.
- f. Sarana dan prasarana merupakan salah satu dukungan yang paling penting dalam pengembangan usaha kecil. Dengan terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana, maka dapat memberikan dorongan bagi

pertumbuhan ekonomi masyarakat Pulau Bunaken.

3. Aktor

Aktor adalah mengacu kepada setiap bagian dari masyarakat pulau Bunaken yang perlu dilibatkan dalam rangka pengembangan usaha kecil sektor wisata bahari untuk mencapai sasaran utama yaitu pemberdayaan masyarakat. Aktor-aktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan usaha kecil sektor wisata bahari di pulau Bunaken adalah:

- a. Masyarakat pulau kecil di Pulau Bunaken wajib untuk dipertimbangkan keikutsertaannya dalam pengembangan usaha kecil sektor wisata bahari, karena peran utamanya sebagai pelaku dalam usaha kecil.
- b. Pemerintah Daerah (Pemda) merupakan jalan untuk terbukanya usaha tersebut di pulau Bunaken, karena Pemda yang nantinya menentukan kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan yang kemungkinannya akan dapat melancarkan jalannya usaha kecil sektor wisata bahari, atau malah sebaliknya, yaitu menghambat. Dengan kata lain, Pemda sangat menentukan iklim usaha kecil sektor wisata bahari di pulau Bunaken. Kontribusi Pemda yang terpenting adalah meningkatkan dan menumbuhkan upaya kreatif masyarakat untuk membidik potensi daerah dan mengelolanya.
- c. Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) turut serta dalam hal pengawasan dan pengendalian terhadap pengembangan dari kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan yang dibuat oleh Pemda untuk keberlangsungan pengembangan usaha kecil sektor wisata bahari.
- d. Lembaga keuangan, selain memberikan modal juga dapat memberikan pinjaman dengan bunga tertentu. Selain itu, lembaga keuangan dapat digunakan sebagai tempat menyimpan uang yang biasanya berbunga tiap tahunnya, contohnya bank, koperasi dan lain-lain. Dalam hal ini, modal menjadi penggerak yang tidak kalah penting khususnya demi kelancaran operasional usaha setiap saat. Hal ini mengingat keterbatasan Pemda dalam pemberian subsidi untuk sebuah usaha, karena Pemda harus membagi anggarannya untuk kegiatan atau program-program lain di daerahnya.
- e. Pihak investor adalah pihak di luar lembaga keuangan atau perbankan yang berperan utama dalam hal penyediaan modal bagi usaha kecil. Pihak investor dibedakan dari lembaga keuangan, karena sifat dan cara kerjanya yang berbeda. Investor biasanya hanya sekedar memberikan modal kepada pelaku industri sebagai roda operasional dalam usaha kecil sektor wisata bahari.
- f. Pelaku industri yang dimaksudkan adalah masyarakat pulau Bunaken yang terjun

langsung dalam pengembangan usaha kecil sektor wisata bahari.

4. Tujuan

Tujuan yang dimaksud adalah hal-hal yang ingin dicapai oleh masing-masing aktor untuk mencapai sasaran utama dari pengembangan usaha kecil. Tujuan yang diidentifikasi adalah:

- a. Peningkatan penyerapan tenaga kerja. Dengan adanya pengembangan usaha kecil sektor wisata bahari, diharapkan angkatan kerja ataupun pengangguran khususnya dapat terserap dalam usaha sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh masing-masing.
- b. Peningkatan pendapatan masyarakat. Masyarakat Pulau Bunaken sebagai masyarakat pulau kecil pada awalnya memperoleh pendapatan hanya pada hasil tangkapan sumber daya laut (ikan) dan kini dapat memperoleh pendapatan tambahan melalui usaha kecil di sektor wisata bahari.
- c. Perluasan usaha yang dimaksud adalah bagaimana membuat diversifikasi dari usaha yang sudah ada. Sedangkan penciptaan usaha baru adalah usaha yang sama sekali belum ada dan mempunyai potensi untuk dikembangkan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, yaitu keindahan SDA laut yang dimiliki pulau Bunaken.

5. Alternatif Strategi

Alternatif strategi berkenaan dengan kebijakan-kebijakan spesifik yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran utama, yaitu:

- a. Pemanfaatan pulau kecil sebagai obyek usaha kecil sektor wisata bahari penting untuk dilakukan, mengingat pulau kecil memiliki potensi alam melimpah dan merupakan modal utama dalam pengembangan usaha kecil sektor wisata bahari.
- b. Peningkatan kesadaran masyarakat lokal terhadap upaya pelestarian potensi SDA di pulau kecil agar dapat menghindari terjadinya kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan strategi peningkatan kesadaran masyarakat lokal terhadap lingkungan sekitar. Apabila lingkungan rusak, maka wisatawan enggan untuk berkunjung, sehingga mengakibatkan pendapatan masyarakat menjadi menurun, bahkan nihil.
- c. Peningkatan mekanisme pengelolaan usaha kecil sektor wisata bahari ini ini dibentuk dari gabungan dan kerjasama antara pihak masyarakat pulau Bunaken, pelaku industri, Pemerintah Daerah Kota Manado, dan lembaga penelitian/perguruan tinggi/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Lembaga keuangan. Kerjasama ini diwujudkan melalui kontribusi masing-masing. Masyarakat pulau kecil membentuk kelompok-kelompok atau kelembagaan dan melaku-

- kan pengembangan dan penciptaan usaha kecil sektor wisata bahari melalui pengarahan dari Pemda dan bantuan modal/subsidi Pemda. Selain itu, pengarahan dan pengawasan dari Pemda tetap diperlukan bagi masyarakat pulau Bunaken dan pelaku industri. Sedangkan pelaku industri diharapkan tidak hanya mementingkan keuntungan yang ingin diraih, tetapi juga memberi arahan, khususnya bagi masyarakat pulau Bunaken dan bekerja-sama dalam rangka meningkatkan mutu produk. Keuntungan/margin yang diperoleh dibagikan kepada ketiganya, dengan peraturan yang ditetapkan dalam pola kemitraan tersebut. Peranan lembaga penelitian/LSM dalam pola kemitraan juga sangat penting, yaitu sebagai “penyalur” ilmu, pengembangan teknologi, peningkatan mutu SDM. Kerjasama dengan perguruan tinggi diharapkan mampu meningkatkan mutu usaha. Kerjasama yang dimaksud, terutama dalam bentuk teknologi (*technoware*) tepat guna dan *infoware* bagi masyarakat pulau Bunaken yang terlibat langsung dengan usaha kecil sektor wisata bahari yang akan dikembangkan, yaitu masyarakat pulau Bunaken dan pelaku industri.
- d. Pembangunan sarana dan prasarana di pulau kecil dimaksudkan untuk mendukung terciptanya produk-produk wisata, khususnya wisata bahari. Dengan adanya pembangunan ini diharapkan dapat menjadi pemicu dalam pengembangan usaha kecil sektor wisata bahari dan dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan yang akan berkunjung.
 - e. Peningkatan keterampilan SDM dan teknologi dalam mendukung usaha kecil sektor wisata bahari sebagai persyaratan wajib dipenuhi, agar usaha ini tetap bertahan dan terus berkembang. Peningkatan mutu ini dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan.
 - f. Perbaikan kebijakan dan kelembagaan dimaksudkan untuk memberikan dukungan terhadap perkembangan usaha kecil sektor wisata bahari bagi masyarakat pulau Bunaken. Kebijakan-kebijakan serta peraturan ditangani oleh pemerintah daerah atau dinas-dinas yang terkait misalnya DKP, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal (Indagkop). Salah satu kelemahan bagi usaha kecil sektor wisata bahari di pulau kecil adalah kurangnya permodalan dan keterampilan SDM yang belum maksimal, sehingga kelompok-kelompok usaha kecil yang sudah ada tidak lagi berjalan dengan baik, bahkan dapat dikatakan mati. Hal ini disebabkan karena banyak hal, antara lain kurangnya pembinaan dari pihak-pihak terkait dan tidak adanya kepastian prospek usaha, sehingga kelompok usaha kecil tidak lagi aktif. Selain itu peraturan-peraturan daerah yang ada saat ini kadang-kadang memberatkan bagi usaha kecil, terutama dalam hal perijinan, sehingga tidak dapat memfasilitasi perkembangan usaha kecil sektor wisata bahari di pulau kecil. Oleh sebab itu, perlu bagi pemerintah, terutama daerah untuk mengaktifkan kembali kelompok-kelompok usaha kecil dan meneruskan pembinaan agar timbul gairah dan inisiatif untuk terus berkembang mendukung usaha kecil sektor wisata bahari dalam hal pemeliharaan lingkungan, serta peningkatan pelatihan-pelatihan mengenai usaha kecil sektor wisata bahari. Kebijakan-kebijakan atau peraturan yang ada perlu untuk ditinjau kembali, agar dapat memfasilitasi kepentingan dari pemerintah dan juga usaha kecil.
- Hasil penentuan sasaran hirarki strategi pengembangan usaha mikro dan kecil sektor wisata bahari di Pulau Bunaken (**1,000**) adalah: (1) Faktor (**SDA: 0,182**; SDM: 0,145; SDB: 0,179; kebijakan: 0,123; poleksosbud: 0,144; **sarana dan prasarana (sarpras): 0,227**), (2) Aktor (**masyarakat PPK: 0,310**; Pemda: 0,115; DKP: 0,157; **pelaku industri: 0,224**; lembaga keuangan: 0,079; investor: 0,095), (3) Tujuan (peningkatan penyerapan tenaga kerja: 0,231; **peningkatan pendapatan masyarakat: 0,341**; **perluasan usaha: 0,262**; penciptaan usaha: 0,106), (4) Alternatif Strategi (**Pemanfaatan pulau kecil sebagai obyek usaha mikro dan kecil sektor wisata bahari: 0,214**; peningkatan kesadaran masyarakat lokal: 0,048; peningkatan mekanisme pengelolaan wisata bahari di pulau kecil: 0,024; **pembangunan sarpras di pulau kecil: 0,167**; **peningkatan keterampilan SDM dalam mendukung usaha mikro dan kecil: 0,167**; perbaikan kebijakan dan kelembagaan: 0,143).
- Berdasarkan hirarki strategi pengembangan usaha mikro dan kecil sektor wisata bahari di pulau Bunaken dihasilkan hal-hal berikut:
1. Faktor yang paling mendukung adalah adanya peningkatan sarana dan prasarana dengan tetap memperhatikan kelestarian SDA. Peningkatan sarpras dalam pengembangan akses transportasi (kapal) memiliki fungsi, berikut:
 - a. memudahkan aksesibilitas dari dan ke pulau Bunaken.
 - b. untuk mengangkut kebutuhan air bersih.
 - c. melakukan pengawasan bagi kegiatan-kegiatan yang tidak ramah lingkungan, seperti pemboman dan pembusukan ikan yang merusak SDA dan perairan pulau Bunaken.
 2. Aktor yang paling tinggi keterlibatannya adalah masyarakat pulau-pulau kecil (khususnya masyarakat pulau Bunaken) yang menjadi pelaku industri sektor wisata bahari di sektor primer (pemilik fasilitas produk wisata), sektor sekunder (pedagang asongan, pedagang

- cinderamata, pedagang makanan, dan penyewaan perahu katamaran) dan sektor tersier (pertunjukkan budaya lokal bagi para wisatawan).
3. Tujuan utama dalam pengembangan usaha mikro dan kecil sektor wisata bahari di pulau Bunaken adalah peningkatan pendapatan masyarakat dengan berkembangnya mata pencaharian alternatif sektor wisata bahari sebagai perluasan usaha di pulau-pulau kecil.
 4. Alternatif strategi adalah pemanfaatan pulau kecil sebagai obyek usaha mikro dan kecil sektor wisata bahari, yang ditunjang oleh:
 - a. pembangunan sarpras transportasi dalam mendukung peningkatan kunjungan wisatawan ke pulau Bunaken.
 - b. peningkatan keterampilan SDM dalam mendukung usaha mikro dan kecil sektor wisata bahari melalui pelatihan-pelatihan yang dilakukan baik oleh pemerintah, swasta, perguruan tinggi, maupun lembaga terkait lainnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Jenis usaha mikro, kecil dan menengah pendukung wisata bahari di Pulau Bunaken dapat dikategorikan atas:
 - a. Usaha mikro dan kecil sektor wisata bahari primer, seperti penyewaan alat selam, *homestay* dan sewa perahu katamaran.
 - b. Usaha mikro dan kecil sektor wisata bahari sekunder meliputi penjual cinderamata dan makanan, penjual kelapa muda dan pemandu wisata.
 - c. Usaha mikro dan kecil sektor wisata bahari tersier meliputi *cottage*, hotel, *restaurant* dan pemilik perahu.
2. Urutan skenario pengelolaan pengembangan usaha mikro dan kecil sektor wisata bahari di Pulau Bunaken adalah (a) Skenario optimis dengan bobot 0,56, (b) Skenario semi optimis dengan bobot 0,22, (c) Skenario pesimis dengan bobot 0,17, (d) Skenario semi pesimis dengan bobot 0,14.
3. Strategi pengembangan usaha mikro dan kecil sektor wisata bahari di Pulau Bunaken didasarkan urutan berikut:
 - a. Faktor urutan pertama adalah faktor sarpras dan urutan kedua adalah faktor SDA.
 - b. Aktor yang paling berperan pada urutan pertama adalah masyarakat Pulau Bunaken dan di urutan kedua adalah pelaku industri.
 - c. Tujuan yang ingin dicapai pada urutan pertama adalah pemberdayaan masyarakat

kat pulau kecil sebagai upaya meningkatkan pendapatan masyarakat dan di urutan kedua adalah perluasan usaha.

- d. Alternatif Strategi yang menjadi urutan pertama adalah strategi pemanfaatan pulau kecil sebagai objek usaha kecil sektor wisata bahari dan di urutan kedua adalah pembangunan sarana dan prasarana di pulau kecil, serta peningkatan keterampilan SDM dalam mendukung usaha kecil.

Saran

1. Peningkatan SDM sebagai upaya meningkatkan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan bagi pengguna wisata bahari di Pulau Bunaken, disamping sarana prasarana pendukung seperti kapal angkut sebagai sarana pengangkut air bersih.
2. Dalam rangka memberdayakan UMKM, perlu adanya kerjasama dengan lembaga keuangan setempat berupa pinjaman modal tanpa tanggungan dengan suku bunga kompetitif dan persyaratan mudah.
3. Perlu sosialisasi intensif dari Pemerintah Daerah maupun lembaga terkait lainnya mengenai pelestarian dan kebersihan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- (DKP) Departemen Kelautan dan Perikanan, 2006. Laporan Akhir Model Pengembangan dan Valuasi Ekonomi Kawasan Wisata Bahari di Pulau-pulau Kecil, Jakarta.
- _____. 2007. Laporan Hasil Identifikasi dan Potensi Pulau-pulau Kecil, Jakarta.
- Hidayat, A. 2002. Konsep dan Kebijakan Pengembangan Wisata bahari. Seawatch Indonesia, BPPT, Himiteka IPB.
- Marimin. 2004. Teknik dan Aplikasi Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk. PT. Grasindo, Jakarta.
- Munandar, A. 2007. Dampak Lingkungan, Ekonomi dan Sosial Budaya. Hand-out Mata Kuliah Kebijakan dan Pengelolaan Ekowisata. Pascasarjana IPB, Bogor.
- Saaty, T.L. 1993. Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin, Proses Hierarki Analitik untuk Pengambilan Keputusan dalam situasi yang kompleks. Seri Manajemen No. 134/1993 (Terjemahan). Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.